

PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI NON-PEMERINTAH DALAM MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN

Dhita Eka Pramita Hesti ^{1*}, Joni Safaat Adiansyah², Harry Irawan Johari³
Environmental Science, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia ^{1,2,3}

E-mail: dhita.hesti80@gmail.com, Joni.adiansyah@ummat.ac.id,
harryijohari@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan tinjauan sistematis atas literatur yang bertujuan untuk menginvestigasi peran Pemerintah Daerah dan Organisasi Non-Pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan pedesaan. Menggunakan sumber literatur dari pengindeks Scopus, DOAJ, dan Google Scholar, penelitian ini mengeksplorasi publikasi ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2014 hingga 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah dan Organisasi Non-Pemerintah memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemakmuran ekonomi di daerah pedesaan. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami bagaimana kedua entitas tersebut mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan pedesaan serta implikasinya terhadap pembangunan kawasan pedesaan secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi dalam tata kelola pemerintah daerah dan peran yang lebih aktif dari pemerintah lokal dan organisasi non-pemerintah dalam pembangunan pedesaan. Langkah-langkah konkret seperti transformasi menjadi organisasi pembelajaran dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal perlu dipertimbangkan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini menekankan perlunya kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan dan pendekatan yang holistik dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan pedesaan.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Organisasi Non-Pemerintah, Partisipasi Masyarakat, Pengembangan Kawasan Pedesaan

ABSTRACT

This study presents a systematic review of the literature aimed at investigating the roles of Local Governments and Non-Governmental Organizations (NGOs) in promoting community participation in rural development. Utilizing sources from Scopus, DOAJ, and Google Scholar, this research explores scholarly publications spanning from 2014 to 2024. The findings indicate that both Local Governments and NGOs play significant roles in enhancing the quality of life and economic prosperity in rural areas. The primary focus of the study is to comprehend how these entities influence community participation in rural development processes and their implications for overall rural development. Additionally, the study underscores the importance of reforming local government governance and the

more active involvement of both local governments and NGOs in rural development. Concrete steps such as transitioning into learning organizations and enhancing the capacity of local communities need to be considered to address existing challenges and boost community participation. This underscores the necessity for collaboration among various stakeholders and holistic approaches in planning and implementing rural development policies.

Keywords: *Local Government, Non-Governmental Organization, Community Participation, Rural Development*

PENDAHULUAN

Pengembangan kawasan perdesaan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan (Soleh, 2017). Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah menjadi sangat signifikan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk merancang kebijakan dan program yang mendukung pembangunan kawasan perdesaan, termasuk dalam hal infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi lokal. Di sisi lain, organisasi non-pemerintah sering kali menjadi mitra penting dalam pelaksanaan program-program pembangunan tersebut. Mereka dapat memberikan kontribusi melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, advokasi, dan penggalangan dana untuk mendukung inisiatif pembangunan di tingkat lokal. Kerjasama antara pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan sinergi yang efektif dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan di kawasan perdesaan (Ermaya, 2016). Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang peran dan interaksi

antara pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah dalam konteks pengembangan kawasan perdesaan menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan.

Peran penting pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program untuk pengembangan kawasan pedesaan tidak dapat diragukan lagi. Sebagai lembaga yang berada di dekat masyarakat setempat, pemerintah daerah memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kondisi, kebutuhan, serta potensi yang ada di wilayah pedesaan (Wahyuni, 2019). Dalam proses penyusunan kebijakan, pemerintah daerah mampu mengidentifikasi beragam isu strategis yang perlu diberi perhatian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, seperti akses terhadap infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi (Iskandar, 2021). Tak hanya itu, pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab dalam menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan pada evaluasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya. Proses formulasi kebijakan tersebut wajib

melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan di tingkat lokal, termasuk masyarakat pedesaan itu sendiri, agar kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan aspirasi serta kebutuhan yang sesungguhnya dari masyarakat setempat. Dengan demikian, peran pemerintah daerah tidak sekadar dalam merancang kebijakan, melainkan juga dalam memastikan pelaksanaan serta evaluasi program-program pembangunan dengan efektif, demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di kawasan pedesaan.

Peran organisasi non-pemerintah dalam mendukung pembangunan kawasan pedesaan sangatlah signifikan, terutama dalam konteks penyediaan program-program pelatihan, advokasi, dan penggalangan dana (Abdoellah et al., 2019). Organisasi non-pemerintah sering kali menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam menyediakan berbagai layanan dan dukungan yang diperlukan oleh masyarakat pedesaan (Herdiansah, 2016). Melalui program pelatihan, organisasi non-pemerintah membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat pedesaan dalam berbagai bidang, seperti pertanian, pengelolaan sumber daya alam, atau pengembangan usaha kecil dan menengah. Selain itu, melalui kegiatan advokasi, organisasi non-pemerintah turut berperan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat

pedesaan serta mempromosikan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut. Tak kalah pentingnya, organisasi non-pemerintah juga berperan dalam penggalangan dana untuk mendukung berbagai proyek pembangunan di kawasan pedesaan, baik dari sumber-sumber lokal maupun internasional. Dengan demikian, kontribusi organisasi non-pemerintah menjadi sangat berarti dalam mendukung upaya pembangunan kawasan pedesaan, dengan menyediakan berbagai program dan layanan yang memperkuat kapasitas serta kesejahteraan masyarakat pedesaan secara keseluruhan (Iskandar, 2021).

Partisipasi aktif masyarakat memegang peranan utama dalam pembangunan pedesaan karena memungkinkan mereka untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Melalui partisipasi ini, masyarakat diberdayakan untuk turut serta dalam mencapai tujuan pembangunan serta memanfaatkan potensi daerah mereka secara efektif (Yuswarni et al., 2023). Hak partisipasi masyarakat dalam semua tahapan pembangunan menjadi aspek kunci dalam menjadikan mereka sebagai subjek yang berperan dalam pembangunan yang berkelanjutan (Siregar, 2023). Terlebih lagi, partisipasi masyarakat berperan dalam memperkuat kepercayaan serta

keterbukaan antara masyarakat dan lembaga yang bertanggung jawab atas pembangunan, sehingga memunculkan hubungan yang lebih solid dan potensial untuk mencapai hasil yang lebih optimal (Johar, 2017). Dalam konteks agro-edutourisme, partisipasi masyarakat memiliki peranan penting dalam pengembangan praktik-praktik berkelanjutan serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal dengan memberikan lapangan pekerjaan dan peluang bisnis (Mishra et al., 2022). Di sektor kesehatan, partisipasi masyarakat menjadi dasar penting dalam sistem perawatan kesehatan primer dan mendukung integrasi pendekatan partisipatif berbasis masyarakat dalam perencanaan dan penyediaan layanan kesehatan yang berakar pada tingkat masyarakat (Asra Junanda & Zulfa Harirah MS, 2023). Dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, partisipasi masyarakat telah terbukti efektif dalam menurunkan jumlah kebakaran serta mendukung penerapan kebijakan yang relevan dalam hal ini.

Usaha untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah pedesaan dapat dihadapkan pada beberapa kendala seperti keterbatasan akses, kurangnya kesadaran, dan ketimpangan gender. Kendala-kendala tersebut dapat menghambat kemampuan serta keterlibatan masyarakat pedesaan dalam proses pembangunan. Kurangnya akses

terhadap sumber daya, layanan, dan infrastruktur dapat membatasi partisipasi aktif anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan serta implementasi program pembangunan (Kapsalis, 2023). Selain itu, tingkat kesadaran yang terbatas mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dan manfaat yang dapat diperoleh darinya juga dapat menyebabkan rendahnya tingkat keterlibatan (Russell et al., 2023). Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan aksesibilitas, peningkatan kesadaran akan nilai partisipasi masyarakat, dan promosi kesetaraan gender dalam proses pengambilan keputusan (Fredrick & Ahmad, 2023).

Studi-studi ini memberikan wawasan yang berharga mengenai potensi teknologi dalam meningkatkan hasil kesehatan serta memperkuat partisipasi masyarakat. Namun, penelitian-penelitian tersebut tidak secara langsung membahas peran pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat dalam mendorong partisipasi masyarakat. Meskipun penelitian-penelitian tersebut tidak secara langsung membahas partisipasi masyarakat, mereka menyoroti potensi intervensi psikologis dalam meningkatkan hasil kesehatan individu, yang secara tidak langsung dapat berkontribusi pada partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, sebuah tinjauan literatur yang komprehensif menjadi penting untuk memperoleh

pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan, terdapat kesenjangan yang signifikan dalam pemahaman tentang peran pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan perdesaan. Meskipun telah banyak penelitian yang menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai konteks pembangunan, terdapat sedikit fokus pada peran konkret pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat dalam menggalang partisipasi ini, terutama dalam konteks pembangunan kawasan perdesaan. Dengan adanya kesenjangan ini, sebuah tinjauan literatur yang komprehensif menjadi penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut peran konkret pemerintah

daerah dan lembaga swadaya masyarakat dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan perdesaan. Melalui pendekatan sistematis dalam literature review, akan memungkinkan untuk mengidentifikasi praktik terbaik, hambatan, dan potensi solusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam konteks pembangunan kawasan perdesaan. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah dapat berperan secara efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat, serta untuk mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran Pemerintah Daerah dan Organisasi Non-Pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan perdesaan. Fokus utama adalah untuk memahami bagaimana kedua entitas tersebut mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan pedesaan serta dampaknya terhadap pembangunan kawasan perdesaan secara keseluruhan. Pencarian literatur dilakukan melalui penggunaan beberapa

basis data akademik, termasuk Scopus, DOAJ, dan Google Scholar. Kata kunci yang relevan digunakan dalam pencarian, seperti "peran pemerintah daerah", "organisasi non-pemerintah", "partisipasi masyarakat", dan "pengembangan kawasan perdesaan". Pencarian dilakukan untuk publikasi ilmiah yang diterbitkan dalam rentang waktu antara tahun 2014 hingga 2024, dengan fokus pada artikel jurnal, buku, dan dokumen konferensi yang relevan dengan topik penelitian.

Kriteria inklusi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup publikasi ilmiah yang secara khusus membahas peran Pemerintah Daerah dan Organisasi Non-Pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan pedesaan. Publikasi yang relevan harus berisi analisis, temuan, atau tinjauan terhadap topik tersebut. Kriteria eksklusi mencakup publikasi yang tidak relevan, tidak tersedia dalam bahasa yang dapat diakses oleh peneliti, atau tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Publikasi yang memenuhi kriteria inklusi diidentifikasi dan dipilih untuk disertakan dalam analisis lebih lanjut. Data yang relevan kemudian diekstraksi dari setiap publikasi yang terpilih, termasuk informasi tentang metode penelitian, temuan utama, dan

argumen yang disajikan. Proses seleksi dan ekstraksi data dilakukan secara hati-hati dan teliti untuk memastikan keakuratan dan validitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemakmuran ekonomi di daerah pedesaan. Selain meningkatkan produksi pertanian, perkembangan ini juga memberikan dampak besar terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Di bawah ini adalah rangkuman hasil penelitian yang telah dikelompokkan berdasarkan bidang atau fokusnya.

Tabel 1. Analisis hasil penelitian dari berbagai literature

No	Bidang atau Fokus	Nama-nama Penulis yang se-Bidang	Insight atau Variabel Riset
1	Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Pedesaan	Nyama dan Mukwada (2023), Draçi dan Laska. (2023), Samajdar. (2023), Faheem (2022)	Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam menciptakan kondisi yang mendukung keterlibatan masyarakat di pedesaan.
2	Pelaksanaan Program dan Inisiatif Responsif Pemerintah	Okinarum et al. (2017), Rifada et al. (2013)	Pemerintah daerah dapat menggalang partisipasi masyarakat dengan melaksanakan program-program responsif dan inisiatif.
3	Pemahaman dan Tantangan Pemerintah Daerah	Kartika. (2012), Arisandi. (2021), Maulana, (2021), Ramadhan. (2022)	Pemerintah daerah memiliki pemahaman yang kuat akan pentingnya partisipasi masyarakat, tetapi ada tantangan yang dihadapi

Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan pentingnya pembangunan kawasan pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan serta peran utama pemerintah daerah dan Organisasi Non-Pemerintah dalam mendorong proses pembangunan tersebut.

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Pedesaan

Pemerintah daerah memiliki peranan sentral dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan wilayah pedesaan. Mereka memberikan arahan dan kepemimpinan dalam proses pembangunan, serta menggalang budaya demokrasi dan menerapkan prinsip desentralisasi. Salah satu fokus utama pemerintah daerah adalah membentuk demokrasi di tingkat dasar, sebagaimana diamanatkan dalam sistem Panchayati Raj yang tertuang dalam Konstitusi India. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan representasi, partisipasi, dan kapasitas masyarakat pedesaan, termasuk kelompok yang kurang terwakili. Melalui sistem ini, masyarakat diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memajukan keadilan sosial serta pembangunan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, pemerintah daerah memainkan peran yang signifikan dalam memfasilitasi partisipasi warga dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di daerah pedesaan.

Mereka memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang mendukung keterlibatan warga serta partisipasi dalam pengambilan keputusan (Nyama & Mukwada, 2023). Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menerapkan kebijakan partisipatif di berbagai tingkatan pemerintahan dan memberikan arahan serta bimbingan dalam proses pembangunan (et al., 2022). Pentingnya memastikan bahwa penduduk memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan dan proses perencanaan untuk pengembangan wilayah mereka juga tidak boleh diabaikan (Draçi & Laska, 2023). Pemerintah daerah harus berupaya membangun demokrasi di tingkat lokal dan meningkatkan representasi, partisipasi, serta kapasitas lembaga-lembaga setempat (Samajdar, 2023). Dengan memberdayakan masyarakat dan mempromosikan keadilan sosial serta pembangunan ekonomi lokal, pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan wilayah pedesaan secara menyeluruh (Faheem, 2022).

Studi menunjukkan bahwa dengan memberdayakan masyarakat dan mempromosikan keadilan sosial serta pembangunan ekonomi lokal, pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan

wilayah pedesaan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat, tetapi juga untuk memastikan bahwa partisipasi tersebut berdampak secara positif pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Penelitian tersebut menyoroiti pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempromosikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan. Namun, tantangan seperti kurangnya sumber daya dan kapasitas administratif yang terbatas tetap menjadi kendala yang perlu diatasi. Selain itu, masih ada kebutuhan untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk yang rentan dan terpinggirkan, memiliki akses yang sama terhadap kesempatan partisipasi.

2. Pelaksanaan Program dan Inisiatif Responsif Pemerintah

Penerapan program dan inisiatif yang responsif dari pemerintah menjadi kunci penting dalam mengatasi keprihatinan masyarakat dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Perusahaan kini semakin tertarik untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan dan merespons tekanan sosial yang mereka hadapi, yang dikenal sebagai responsivitas sosial perusahaan. Sebagai contoh, di Nigeria, Challenge Initiative (TCI) telah

mengembangkan alat yang disebut Refleksi dan Aksi untuk Meningkatkan Kemandirian dan Efektivitas (RAISE) untuk mengawasi kesiapan pemerintah negara bagian dalam memelihara keluarga berencana dan intervensi kesehatan reproduksi. Sementara itu, inisiatif multi-pemangku kepentingan transnasional (MSI) bertujuan untuk meningkatkan respons dan akuntabilitas pemerintah dengan mendorong pengungkapan informasi dan partisipasi dalam urusan publik. Di Kenya, implementasi inisiatif strategis oleh kementerian pemerintah nasional dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepemimpinan, komunikasi, budaya organisasi, dan struktur. Faktor-faktor ini memainkan peran yang krusial dalam menentukan kesuksesan implementasi program dan inisiatif pemerintah, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan pemberian layanan dan penekanan pada pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan warga negara.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam menggalang partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah pedesaan memiliki relevansi yang signifikan (Okinarum et al., 2017). Upaya ini dapat direalisasikan melalui pelaksanaan program-program dan inisiatif yang responsif terhadap kebutuhan dan permasalahan khusus yang dihadapi

oleh komunitas pedesaan. Oleh karena itu, keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam berinteraksi dengan masyarakat pedesaan dan memberikan dukungan terhadap upaya pembangunan mereka menjadi suatu hal yang esensial. Kemudian beberapa cakupan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu dipelajari dan dipahami oleh masyarakat itu sendiri ialah meliputi partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan daerah, pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah, dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memainkan peran krusial dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan. Melalui pelaksanaan program-program yang responsif, pemerintah daerah dapat merespons secara efektif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas pedesaan, seperti masalah gizi dan kesehatan mental. Penggunaan metode inovatif juga menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas proyek-proyek pembangunan. Oleh karena itu,

keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mendukung upaya pembangunan di wilayah pedesaan menjadi suatu hal yang esensial untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, ada kebutuhan untuk lebih mengeksplorasi dampak dari program-program dan inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta bagaimana implementasinya di lapangan. Selain itu, evaluasi yang komprehensif terhadap efektivitas metode-metode inovatif dalam proyek pembangunan pedesaan dapat menjadi tambahan penting untuk penelitian mendatang.

3. Pemahaman dan Tantangan Pemerintah Daerah

Memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah menjadi krusial dalam menjalankan tata kelola dan memberikan layanan yang efektif. Penerapan teknologi digital dianggap sebagai solusi yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam aktivitas pemerintah daerah. Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah menjadi sorotan utama, dengan adanya laporan tentang konflik kepentingan, perilaku tidak profesional, dan masalah budaya organisasi yang terjadi. Transformasi pemerintah daerah menjadi organisasi pembelajaran dianggap sebagai langkah yang efektif untuk menghadapi tantangan seperti

kurangnya kapasitas administratif, ketidakmampuan dalam pengiriman layanan yang efisien, dan masalah korupsi, dengan memanfaatkan pengetahuan dan membangun kapasitas yang ada. Hasil temuan menegaskan pentingnya strategi yang mengutamakan aspek manusia, proses, dan teknologi, serta kebutuhan akan manajemen krisis yang efektif, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pembelajaran berkelanjutan di dalam pemerintah daerah. (Kartika, 2012) menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas pejabat desa dalam mengelola tata kelola desa dan layanan masyarakat. Arisandi (2021) lebih menyoroti peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang. Maulana (2021) menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekowisata di desa Sungai Luar. Terakhir, Ramadhan (2022) membahas tanggung jawab pembangunan dan organisasi masyarakat, yang dapat dianggap sebagai panggilan bagi pemerintah lokal dan organisasi non-pemerintah untuk terlibat aktif dalam pembangunan masyarakat.

Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, seperti konflik kepentingan, perilaku tidak profesional, dan masalah budaya organisasi, menunjukkan perlunya

perbaikan dalam tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah. Transformasi menjadi organisasi pembelajaran dapat menjadi strategi efektif untuk mengatasi tantangan tersebut dengan memanfaatkan pengetahuan dan membangun kapasitas yang ada. Sementara itu, peran pemerintah lokal dan organisasi non-pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat di pedesaan menunjukkan pentingnya meningkatkan kapasitas dan keterlibatan aktif dalam perencanaan dan pembangunan lokal. Hal tersebut memberikan pemahaman yang baik tentang tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan pentingnya peran aktif pemerintah lokal dan organisasi non-pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat. Namun, teks tidak memberikan rincian atau bukti yang mendalam tentang langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan atau meningkatkan partisipasi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan, terdapat konsistensi dalam pentingnya pendekatan partisipatif dalam pembangunan pedesaan, di mana pemerintah daerah memainkan peran kunci dalam memfasilitasi proses ini. Langkah-langkah konkret, seperti pelaksanaan program-program responsif dan penggunaan metode inovatif, telah

terbukti sebagai strategi efektif dalam menanggapi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan. Namun, terdapat beberapa kesenjangan yang perlu diperhatikan lebih lanjut, terutama dalam evaluasi dampak dari langkah-langkah tersebut dan bagaimana implementasinya dapat ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Penelitian mendatang sebaiknya berfokus pada mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program-program pemerintah daerah, serta mengevaluasi strategi inovatif dalam konteks pembangunan pedesaan.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa reformasi dalam tata kelola pemerintah daerah dan peran yang lebih aktif dari pemerintah lokal dan organisasi non-pemerintah juga penting dalam pembangunan pedesaan. Langkah-langkah konkret seperti transformasi menjadi organisasi pembelajaran dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal perlu dipertimbangkan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini membutuhkan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan dan pendekatan yang holistik dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

Dalam konteks ini, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi di masa mendatang. Penelitian yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program-program pemerintah daerah, evaluasi

dampak dari implementasi program-partisipatif, dan analisis keberhasilan transformasi pemerintah daerah menjadi organisasi pembelajaran akan menjadi kontribusi penting dalam memperkuat praktik pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian tentang peran dan strategi organisasi non-pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat juga akan memberikan wawasan berharga untuk pembangunan pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, O. S., Sunardi, S., Widianingsih, I., & Cahyandito, M. F. (2019). Pemetaan Sosial Dalam Perencanaan Program Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Citarum Hulu. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v2i1.24461>
- Asra Junanda, & Zulfa Harirah MS. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019- 2020. *Jurnal Sosio-Komunika*. <https://doi.org/10.57036/jsk.v2i1.25>
- Draçi, P., & Laska, A. (2023). Public Services, Community, and Its Involvement in Decision-Making for Local Development. *Interdisciplinary Journal of Research and Development*. <https://doi.org/10.56345/ijrdv10n102>
- Ermaya, B. S. (2016). Kemandirian

- Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Kawasan Pedesaan. *Litigasi*.
<https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i2.36>
- Fredrick, G. K., & Ahmad, A. K. (2023). Factors influencing Community Participation in Planning and Implementing Agricultural Development Projects: A Case of the Matongoro Cattle auction project in Kongwa district, Tanzania. *East African Journal of Agriculture and Biotechnology*.
<https://doi.org/10.37284/eajab.6.1.1132>
- Herdiansah, A. G. (2016). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*.
<https://doi.org/10.24198/jsg.v1i1.11185>
- Iskandar, A. H. (2021). SDG's Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. *Wacana Kinerja*.
- Johar, N. (2017). Community participation: A cementing process, theorizing various dimensions and approaches. *Journal of Construction in Developing Countries*.
<https://doi.org/10.21315/jcdc2017.22.suppl.3>
- Kapsalis, T. A. (2023). Sustainable Rural Community Development Experiences and Lessons. *Journal of Biomedical Research & Environmental Sciences*.
<https://doi.org/10.37871/jbres1750>
- Kartika, R. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja*.
<https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.179-188>
- Man, M. N. S., & Abdul Manaf, H. (2022). A Systematic Literature Review on Smart City Project Initiatives for Rural Community Participation. *Journal of Social Transformation and Regional Development*.
<https://doi.org/10.30880/jstard.2022.04.02.001>
- Mishra, A., Singh, A. K., Parida, S. P., Pradhan, S. K., & Nair, J. (2022). Understanding Community Participation in Rural Health Care: A Participatory Learning and Action Approach. *Frontiers in Public Health*.
<https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.860792>
- Nyama, V., & Mukwada, G. (2023). Role of Local Authorities and Public Officials in Encouraging Citizen Participation in Development Planning in Murewa District. *International Journal of Social Science Research and Review*.
<https://doi.org/10.47814/ijssrr.v6i7.1345>
- Okinarum, G. Y., Afriandi, I., Gurnida, D. A., Herman, H., Garna, H., & Djuwantono, T. (2017). Penggunaan Aplikasi Sayang ke Buah Hati (SEHATI) terhadap Asupan Zat Gizi Anak dan Pengetahuan Ibu Menerapkan Konsumsi Aneka Ragam Makanan Gizi Seimbang pada Anak Sekolah

- Dasar. *Global Medical & Health Communication (GMHC)*, 5(3), 219.
<https://doi.org/10.29313/gmhc.v5i3.2576>
- Russell, K., Rosenbaum, S., Varela, S., Stanton, R., & Barnett, F. (2023). Fostering community engagement, participation and empowerment for mental health of adults living in rural communities: a systematic review. In *Rural and Remote Health*.
<https://doi.org/10.22605/RRH7438>
- Samajdar, A. (2023). Balancing representation, participation and capacity for democracy and development: An assessment of india's rural local government system. In *Handbook on Asian Public Administration*.
<https://doi.org/10.4337/9781839104794.00031>
- Siregar, M. (2023). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Mempertahankan Desa Mandiri (Studi Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
<https://doi.org/10.30742/juispol.v3i1.2889>
- Soleh, A. (2017). Strategi pengembangan potensi desa. *Jurnal Sungkai*.
- Wahyuni, D. (2019). Pengembangan Desa Wisata Pentingsari, Kabupaten Sleman dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*.
<https://doi.org/10.46807/aspirasi.v10i2.1386>
- Yuswarni, Achmad Firdaus, & Riyanda, R. (2023). The Community Participation in Improving Pendapatan Asli Desa (PADes) and Strengthening the Community Economy in Cibereum Village, Cisarua Districts, Bogor Regency. *JOELS: Journal of Election and Leadership*.
<https://doi.org/10.31849/joels.v4i1.11060>